BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebebasan pers di seluruh dunia menyentuh rekor terburuk sepanjang masa. Laporan World Press Freedom Index 2025 milik Reporters Without Borders (RSF) menyatakan adanya kemerosotan drastis pada indeks kebebasan pers di seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Indonesia menduduki peringkat 127 dari 180 negara dengan poin hanya 44,13, jauh di bawah rata-rata global yaitu 54,7 (RSF, 2025). Dengan nilai tersebut, kebebasan pers di Indonesia berada di situasi sulit (*difficult*), satu tingkat di atas level terparah yakni sangat serius (*very serious*).

Dalam menentukan peringkat ini, RSF menggunakan lima indikator utama: konteks politik, kerangka hukum, konteks ekonomi, konteks sosial-budaya, dan yang sangat krusial yaitu tingkat kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan terhadap jurnalis merupakan ancaman signifikan terhadap kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi yang merusak lingkungan tempat pers dapat beroperasi dengan aman (Shader et al., 2021). Kekerasan terhadap jurnalis merupakan refleksi langsung dari seberapa aman ruang kerja pers di suatu negara, dan sejauh mana negara secara konkrit mampu menjamin kebebasan pers.

Dr. Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers, menyatakan bahwa sepanjang tahun 2014 hingga 2023, setidaknya 620 kasus kekerasan terhadap jurnalis telah dilaporkan ke AJI. Namun angka ini diperkirakan belum merefleksikan situasi sebenarnya di lapangan, mengingat masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Survei Yayasan Tifa (2024) yang melibatkan 760 jurnalis dari pelbagai wilayah memperkuat temuan tersebut. Sebanyak 22% responden yang merupakan jurnalis di seluruh Indonesia mengaku pernah mengalami

kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik (Mulia, Prastiwi, & Yudhani, 2024). Dua bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan adalah kekerasan verbal dan pelarangan peliputan.

Pembahasan tentang isu kekerasan terhadap jurnalis tidak dapat dilepaskan dari perspektif gender, mengingat pengalaman kekerasan yang dialami oleh jurnalis dipengaruhi oleh identitas gender mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PR2Media (2021), sebanyak 85,7% jurnalis perempuan di Indonesia melaporkan pernah mengalami pelbagai bentuk kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik. Hal serupa juga tercermin dalam survei Yayasan Tifa (2024) yang mencatat bahwa 23% jurnalis perempuan mengaku pernah mengalami kekerasan saat bertugas. Meskipun tampak lebih rendah secara kuantitatif, nilai persepsi risiko yang diberikan oleh jurnalis perempuan di survei jauh lebih tinggi. Nilai rata-rata indeks risiko yang diberikan oleh responden jurnalis perempuan mencapai 8.55, selisih 0.35 poin di atas skor yang diberikan jurnalis laki-laki (Mulia, Prastiwi, & Yudhani, 2024).

Pola ancaman yang dialami oleh jurnalis perempuan kerap berbeda dengan yang dialami kolega pria mereka. Secara umum, kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang paling lazim terjadi kepada jurnalis di Indonesia (Mulia, Prastiwi, & Yudhani, 2024, dan PR2Media, 2021). Akan tetapi, pada jurnalis perempuan, kekerasan verbal bernuansa seksual menjadi jenis yang paling sering dilaporkan dengan 59% mengaku pernah menjadi korban (PR2Media). Kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang secara eksklusif dialami dan hanya dilaporkan oleh jurnalis perempuan. Laporan Yayasan Tifa (2024) menyebutkan bahwa 12% jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan seksual, sementara tidak ada satu pun jurnalis pria yang melaporkan pengalaman serupa. Temuan ini diperkuat oleh data AJI (2024) yang menunjukkan bahwa dari 852 jurnalis perempuan

yang disurvei, sebanyak 82,6% mengaku pernah mengalami kekerasan seksual dalam pelbagai bentuk, baik di lapangan maupun di ruang digital. Fakta ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis perempuan tidak hanya lebih sering terjadi, tetapi juga lebih kompleks karena melibatkan budaya patriarki yang masih mengakar dan normalisasi objektifikasi tubuh perempuan (Oktarina, Syafriani, & Fathiniah, 2024).

Kekerasan terhadap jurnalis perempuan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan bidang liputan yang mereka geluti. Salah satu contoh nyata terjadi pada Maret 2025, ketika Fransisca Christy Rosana, jurnalis investigatif Tempo, menerima paket ancaman berisi bangkai kepala babi tanpa telinga yang dikirim oleh pihak tak dikenal. Paket tersebut secara eksplisit ditujukan kepada Fransisca, dengan namanya tercantum sebagai penerima. Dalam kesehariannya, Fransisca dikenal aktif meliput isu-isu strategis yang menyentuh pusat kekuasaan serta tokoh-tokoh pengambil kebijakan, termasuk melalui sinjar *Bocor Alus Politik* yang kerap membahas dinamika politik nasional secara kritis. Peristiwa ini mencerminkan pola kekerasan yang lebih luas terhadap jurnalis perempuan, khususnya mereka yang mengungkap praktik ilegal atau menyentuh kepentingan kelompok berkuasa.

Kasus Fransisca bukanlah insiden yang berdiri sendiri. PR2Media (2021) mencatat adanya korelasi antara jenis isu yang diliput oleh jurnalis dan tingkat risiko yang mereka hadapi. Jurnalis yang meliput isu-isu lingkungan, gender, dan orientasi seksual lebih rentan terhadap kekerasan, karena tema-tema tersebut sering bersinggungan dengan kepentingan negara, korporasi besar, maupun kelompok konservatif. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin sensitif dan kontroversial suatu liputan, semakin tinggi pula ancaman yang berpotensi muncul terhadap jurnalis.

Hal tersebut sejalan dengan karakteristik kerja jurnalis investigatif yang secara mendalam menelusuri persoalan laten dalam masyarakat dan sering kali mengguncang

kemampuan otoritas. Jurnalis investigatif adalah mereka yang menggali informasi dan fakta tersembunyi guna membongkar penyalahgunaan kekuasaan, sehingga menjadikan mereka sasaran empuk bagi berbagai bentuk kekerasan dan upaya pembungkaman (Kurnia, 2003). Mereka kerap menghadapi risiko serius, mulai dari ancaman fisik, serangan digital, hingga kriminalisasi atas nama hukum.

Jurnalis investigatif perempuan seperti Fransisca merupakan sosok yang ada dan nyata di tengah ekosistem media di Indonesia. Dalam konteks jurnalis investigatif perempuan, risiko yang dihadapi bersifat berlapis. Identitas gender mereka memperbesar kerentanan di lapangan, baik dalam bentuk pelecehan berbasis gender maupun stigmatisasi sosial. Belum lagi, keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan redaksional masih sangat terbatas. Berdasarkan data AJI, hingga 2021, jurnalis perempuan hanya mencakup sekitar 20% dari total populasi jurnalis di Indonesia, dengan hanya 6% di antaranya yang menduduki posisi strategis (AJI, 2020; 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit jurnalis perempuan yang mampu menembus ranah investigatif, dan mereka pun harus menghadapi tantangan ganda yang kerap kali tidak dialami oleh kolega lakinya.

Sayangnya, sistem pelaporan dan perlindungan hukum terhadap jurnalis perempuan korban kekerasan masih belum optimal. Survei AJI (2020) mencatat bahwa 63,3% jurnalis perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender memilih untuk tidak melaporkan kasusnya. Bagi mereka yang melapor, respons dari institusi, baik dari kantor sendiri maupun penegak hukum, sering kali tidak berpihak dan justru menambah beban psikologis.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa jurnalis investigatif perempuan masih menghadapi kerentanan tinggi dalam menjalankan tugasnya, sementara

jaminan keamanan yang tersedia di Indonesia belum memadai. Oleh karena itu, penelitian terkait pengalaman ancaman dan penerapan strategi keamanan bagi mereka menjadi krusial. Penelitian ini difokuskan pada *Tempo* sebagai salah satu media yang memiliki komitmen tinggi terhadap praktik jurnalisme investigatif. *Tempo* yang erat dengan imaji investigasi telah mengalami dua kali pembredelan pada era Orde Baru, dan hingga kini masih mempertahankan pendekatan editorial yang kritis serta tajam dalam peliputan isu strategis. *Tempo* juga aktif mengembangkan kanal digital, termasuk siniar *Bocor Alus Politik*, yang memperluas jangkauan dan dampak dari praktik jurnalisme investigatif mereka.

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, redaksi *Tempo* kembali menjadi sasaran teror dengan setelah Fransisca, jurnalis *Tempo*, menerima dua paket anonim yang masing-masing berisi simbol ancaman kekerasan: kepala babi tanpa telinga dan enam bangkai tikus. Kedua paket tersebut dikirim secara beruntun dan mengindikasikan adanya upaya nyata untuk mengintimidasi jurnalis perempuan di *Tempo*. Kasus ini menjadi penting untuk diteliti karena mencerminkan kompleksitas ancaman terhadap jurnalis investigatif perempuan. Selain itu, sebagai media yang selama ini diposisikan sebagai standar jurnalisme investigatif di Indonesia, respons dan strategi keamanan yang diterapkan *Tempo* terhadap kasus ini dapat mengisi wawasan mengenai perlindungan jurnalis perempuan yang berkuat di dalam ekosistem media yang maskulin dan penuh risiko.

Dengan menjadikan *Tempo* sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika, tantangan, serta kebijakan internal dalam menciptakan ruang kerja yang aman bagi jurnalis investigatif perempuan, di tengah iklim jurnalisme investigatif Indonesia yang masih sangat androsentris.

1.2 Rumusan Masalah

Dirujuk dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana strategi penerapan keamanan pada jurnalis investigatif perempuan di Tempo?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa jenis ancaman yang dialami oleh jurnalis investigatif perempuan di Tempo?
2. Bagaimana dampak ancaman yang dialami oleh jurnalis investigatif perempuan di Tempo?
3. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) dan upaya perlindungan jurnalis investigatif perempuan di Tempo?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi jenis ancaman yang dialami oleh jurnalis investigatif perempuan di Tempo.
2. Mengetahui dampak ancaman yang dialami oleh jurnalis investigatif perempuan di Tempo.
3. Mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan upaya perlindungan jurnalis investigatif perempuan di Tempo.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan tentang pelbagai bentuk ancaman dan dampaknya terhadap profesionalisme, kesehatan mental, dan keselamatan jurnalis investigatif perempuan di *Tempo*. Lebih lanjut, penelitian ini akan mendalami regulasi serta upaya perlindungan yang telah

diterapkan media tersebut, sekaligus mengidentifikasi kekurangan dalam sistem yang masih perlu diperbaiki. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk penelitian mendatang yang lebih mendalam terkait dengan regulasi keamanan jurnalis investigatif dan/atau jurnalis perempuan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi cerminan realistis mengenai kasus-kasus kekerasan dan ancaman yang dialami oleh jurnalis investigatif perempuan bagi jurnalis aktif dan/atau calon jurnalis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menggambarkan dampak berkepanjangan ancaman-ancaman yang terjadi di ranah profesi jurnalis. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi bahan introspeksi bagi regulator redaksi terhadap pentingnya memiliki regulasi untuk mengantisipasi terjadinya ancaman sebagai bentuk preventif bagi jurnalis yang bernaung.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu kekerasan terhadap jurnalis investigatif yang sering kali luput dari pembicaraan. Tak hanya itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat untuk mulai mengawal kasus-kasus kekerasan jurnalis yang tak kunjung mendapat keadilan.